

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.403429/2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 04
Tanggal : 09 Oktober 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
- 3. Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
- 4. Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
- Sebesar : Rp. 77.250.000 (TUJUH PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 77.250.000
Rp. 77.250.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 77.250.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP | | | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN PANGKAL PINANG (015) Rp. 77.250.000

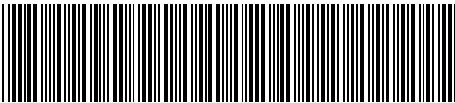
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2024
I A. INFORMASI KINERJA

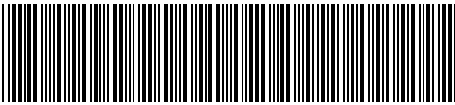


DS:3290-7026-2338-1222

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				77.250.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara				77.250.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
		2. 01	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
		3. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
		4. 01	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
		5. 02	-				
		6. 02	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan				
		7. 02	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN				
		8. 03	-				
		9. 03	Jumlah Penyelesaian Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1059.AEA Koordinasi	1,00	kegiatan		8.800.000
Rincian Output	:	01	AEA.003 Dukungan Penyelesaian Perkara	1.00	kegiatan		8.800.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1059.BCA Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara		510.000
Rincian Output	:	01	BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.00	Perkara		510.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang		33.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96.00	Orang		33.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2024
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3290-7026-2338-1222

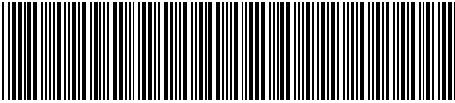
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Klasifikasi Rincian Output	4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	2,00	Perkara, Berkas Perkara	34.940.000		
Rincian Output		:	01	QCA.002	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	(PN)	2.00	Perkara	34.940.000

Jakarta, 24 November 2023
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2024
I B. SUMBER DANA



DS:3290-7026-2338-1222

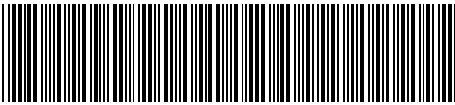
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	77.250.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	77.250.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN

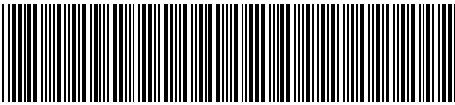


DS:3290-7026-2338-1222

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	-	77.250	-	-	-	77.250	30 . 51	
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	77.250	-	-	-	77.250		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	77.250	-	-	-	77.250		
1059.AEA	Koordinasi	-	8.800	-	-	-	8.800		
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	8.800	-	-	-	8.800		
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	510	-	-	-	510		
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	510	-	-	-	510		
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	-	33.000	-	-	-	33.000		
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000		
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	-	34.940	-	-	-	34.940	30 . 51	
	(30.51 KEP. BANGKA BELITUNG / KOTA PANGKALPINANG)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3290-7026-2338-1222

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG
Kewenangan : (KD)

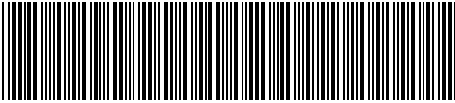
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51] 3	BARANG [52] 4	MODAL [53] 5	BANTUAN SOSIAL [57] 6	LAIN-LAIN [58] 7	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	34.940	-	-	-	34.940	015	
JUMLAH		-	77.250	-	-	-	77.250		

Jakarta, 24 November 2023
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3290-7026-2338-1222

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (30) KEP. BANGKA BELITUNG
Kode>Nama Satker : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

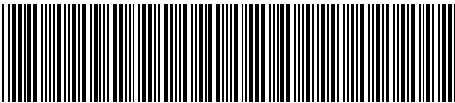
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	3.400	2.800	2.800	3.200	2.800	3.000	3.600	35.593	6.000	5.894	8.163	77.250
		BELANJA BARANG	0	3.400	2.800	2.800	3.200	2.800	3.000	3.600	35.593	6.000	5.894	8.163	77.250
		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	3.400	2.800	2.800	3.200	2.800	3.000	3.600	35.593	6.000	5.894	8.163	77.250
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	3.400	2.800	2.800	3.200	2.800	3.000	3.600	35.593	6.000	5.894	8.163	77.250
		PERKIRAAN PENERIMAAN	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	592	6.972
		- PNBP (425232)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	59	620
005.05.BF.1059	- PNBP (425233)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	122	1.420	
	- PNBP (425239)	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4.932	

Jakarta, 24 November 2023
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2024
IV A. B L O K I R



DS:3290-7026-2338-1222

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

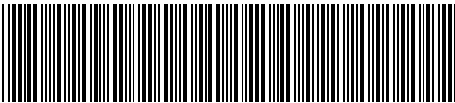
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 005.05.2.403429/2024
IV B. C A T A T A N



DS:3290-7026-2338-1222

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [30] KEP. BANGKA BELITUNG
Kode dan Nama Satker : [403429] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775